

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu**

Tinjauan peneliti terdahulu yang digunakan sebagai pertimbangan bagi peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Zaini (2014). Data analisis yang digunakan adalah data keuangan tahun 2010-2012. Objek penelitian yang digunakan adalah Koperasi Wanita SU Setia Budi Wanita Jawa Timur. Kesimpulan dari penelitian ini ialah implementasi kebijakan penyaluran kredit telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga resiko adanya kredit macet sangat kecil.

Rahmawati (2015) telah melakukan penelitian pada BPR Bank Jombang tahun 2015. Data analisis yang digunakan adalah data keuangan tahun 2012-2014. Kesimpulan dari penelitian ini ialah kebijakan penyaluran kredit yang mencakup permohonan kredit, persyaratan kredit, jaminan kredit, dan kredit bermasalah. Nasabah menilai kebijakan yang dilaksanakan oleh perusahaan sudah efektif.

#### **B. Tinjauan Teori**

##### **1. Keputusan Kredit**

Kasmir (2012 : 143) menjelaskan bahwa keputusan kredit untuk menentukan apakah kredit akan disetujui atau ditolak, jika disetujui, maka dipersiapkan administrasinya. Keputusan kredit yang akan diumumkan

biasanya mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, biaya-biaya yang harus dibayar dan waktu pencairan kredit. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka akan dikirimkan surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

Koperasi selain harus membuat keputusan dalam kebijakan pemberian kreditnya juga harus mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapinya dalam rangka meningkatkan perolehan laba. Risiko ini merupakan kondisi dan situasi yang akan dihadapi di masa yang akan datang yang sangat besar pengaruhnya terhadap perolehan laba. Kasmir (2010:103-104), secara umum jenis-jenis risiko yang mungkin atau akan dihadapi meliputi sebagai berikut:

- a. Risiko Lingkungan, artinya risiko yang berkaitan dengan lingkungan koperasi terutama yang berkaitan dengan lingkungan luar (eksternal) koperasi. Risiko Lingkungan terdiri dari beberapa risiko antara lain: risiko ekonomi, risiko kompetisi dan risiko peraturan yang dibuat pemerintah.
- b. Risiko Manajemen merupakan risiko yang berkaitan dengan risiko dari dalam koperasi (internal), seperti risiko organisasi, risiko kemampuan bank melayani nasabah atau lainnya, dan risiko kegagalan terhadap usaha yang dijalankan
- c. Risiko Penyerahan, juga lebih terpengaruh oleh internal koperasi seperti risiko operasional, risiko perkembangan teknologi dan lainnya.

- d. Risiko Keuangan, berkaitan erat dengan pengaruh internal dan eksternal seperti risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko suku bunga.

Koperasi juga perlu memperhatikan penyaluran kreditnya. Penyaluran kredit sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Koperasi menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya (Ismail 2010:43)
- b. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan kredit yang sudah dikategorikan kredit yang bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan, dikelompokkan menjadi 3 yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet (Ismail 2010:123).
- c. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan salah satu indikator kemampuan koperasi dalam menutup penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang diderita koperasi (Idroes 2007:713).
- d. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan salah satu ukuran likuid dari konsep persediaan yang berupa rasio. Semakin tinggi rasio ini maka secara relatif koperasi kurang berminat untuk memberikan pinjaman (Darmawi 2011:61).
- e. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh BI. Jangka waktu SBI sekurang-kurangnya 1 sampai 3 bulan.

## 2. Kebijakan Kredit dan Faktor-Faktor Penentu

Menurut Rivai (2005:97) setiap koperasi harus memiliki ketentuan kebijakan kredit yang baik dan harus ditetapkan dalam kegiatan penyaluran kredit. Hal ini bertujuan agar pihak koperasi mampu mengawasi portofolio kredit secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit individu. Koperasi harus memiliki standar atau ukuran pengawasan dalam setiap melakukan kegiatan penyaluran kredit untuk menghindari risiko.

Kebijakan perkreditan harus diprogram dengan baik dan benar. Kebijakan adalah suatu pedoman yang menyeluruh baik lisan maupun tulisan. Hasibuan (2004:92) menyebutkan bahwa kebijakan perkreditan antara lain:

- a. *Bankable*, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:
  - 1) *Safety* yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
  - 2) *Effektiveness* artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagai mana dicantumkan dalam proposal kreditnya.
- b. Kebijakan investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk investasi primer dan sekunder, kebijakan resiko, kebijakan penyebaran kredit, serta kebijakan tingkat bunga.

- 1) Investasi primer yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana koperasi seperti pembelian kantor, mesin dan ATK.
  - 2) Investasi sekunder yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Investasi ini sifatnya produktif. Jangka waktu penyaluran kredit harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuiditas koperasi tetap terjamin.
- c. Kebijakan risiko yaitu dalam penyaluran kredit harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan resiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.
  - d. Kebijakan penyebaran kredit yaitu kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, semua golongan ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.
  - e. Kebijakan tingkat bunga yaitu dalam pemberian kredit harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar koperasi, dan tingkat inflasi untuk menetapkan besarnya suku bunga kredit.

Rivai (2006:97) faktor-faktor penting yang terdapat dalam kebijakan kredit adalah:

- a. Kredit yang diberikan bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memerhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

- b. Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan bank telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu pada kebijakan kredit yang jelas. Kebijakan kredit yang jelas termasuk dalam prosedur penyaluran kredit, pengawasan kredit, dan lain-lain.
- c. Kebijakan perkreditan berperan sebagai panduan dalam melaksanakan semua kegiatan perkreditan.
- d. Untuk memastikan bahwa semua koperasi telah memiliki kebijakan perkreditan yang sehat, maka perlu berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Koperasi juga perlu berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Dasar Hukum Koperasi.

Teguh (2001:20) menjelaskan bahwa dalam menetapkan kebijakan perkreditan tersebut harus diperhatikan 3 asas pokok yaitu :

- a. Asas Likuiditas, asas yang mengharuskan koperasi untuk tetap menjaga tingkat likuiditasnya, karena suatu koperasi yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah yaitu hilangnya kepercayaan dari para nasabahnya atau dari masyarakat luas.
- b. Asas Solvabilitas, koperasi harus pandai mengatur penanaman dana dalam kebijakan kreditnya baik pada bidang perkreditan, surat-surat berharga pada suatu tingkat risiko kegagalan yang sekecil mungkin.
- c. Asas Rentabilitas, kegiatan usaha akan selalu mengharapkan untuk memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan mengembangkan dirinya.

Kasmir (2000:91), proses penilaian kriteria sebelum memberikan kredit itu sangat penting. Hal ini dikarenakan setiap lembaga keuangan harus mengetahui kriteria setiap peminjam agar dapat menghindari berbagai macam resiko. Penilaian dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Penilaian kriteria dapat dijelaskan dengan prinsip kredit 5C yaitu:

- 1) *Character* (watak), sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberi kredit benar-benar dapat dipercaya, tujuannya agar lembaga keuangan dapat dengan mudah memberikan kredit kepada calon peminjam.
- 2) *Capacity* (kemampuan), lembaga keuangan dalam melihat kemampuan calon nasabah untuk membayar kreditnya dapat dilihat dari kemampuannya mengelola suatu usaha. Selain itu kemampuan mengembalikan kredit dapat dilihat dari seberapa banyak sumber pendapatan calon nasabah.
- 3) *Capital* (modal), nasabah yang akan mengajukan permohonan kredit harus memiliki sumber pendanaan lain seperti modal sendiri untuk menjalankan usahanya karena bank tidak akan memberikan bantuan dana atau kredit sepenuhnya.
- 4) *Collateral* (jaminan), fungsi jaminan ini digunakan untuk melindungi koperasi dari risiko kredit. Jaminan yang diberikan oleh calon nasabah biasanya bersifat fisik dan non fisik.
- 5) *Condition* (kondisi), kondisi ekonomi calon nasabah di masa sekarang dan di masa yang akan datang harus diperhatikan. Apabila kondisi

ekonominya kurang stabil sebaiknya pemberian kredit tidak diberikan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya resiko kredit.

Penilaian dengan menggunakan analisis 7P adalah sebagai berikut menurut Kasmir (2000;93) :

- a. *Personality*, kepribadian atau tingkah laku nasabah sehari-hari maupun di masa lalu harus di nilai. Kepribadian nasabah akan mempengaruhi proses penyaluram kredit.
- b. *Party*, Nasabah dikelompokkan ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
- c. *Purpose*, tujuan nasabah dalam mengajukan kredit berbeda-beda apakah untuk tujuan konsumtif atau tujuan perdagangan.
- d. *Prospect*, penilaian pada bagian ini dilihat dari segi usaha nasabah. Usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan atau tidak di masa yang akan datang.
- e. *Payment*, cara nasabah dalam mengembalikan atau membayar kredit dilihat dari dana yang diperoleh oleh nasabah untuk membayar kredit berasal dari mana saja.
- f. *Profitability*, kemampuan debitur atau nasabah dalam memperoleh keuntungan.
- g. *Protection*, koperasi membutuhkan perlindungan untuk berjaga-jaga apabila kredit yang disalurkan mengalami kemacetan. Perlindungan yang dibutuhkan dapat berupa jaminan dari nasabah baik barang maupun jaminan asuransi.



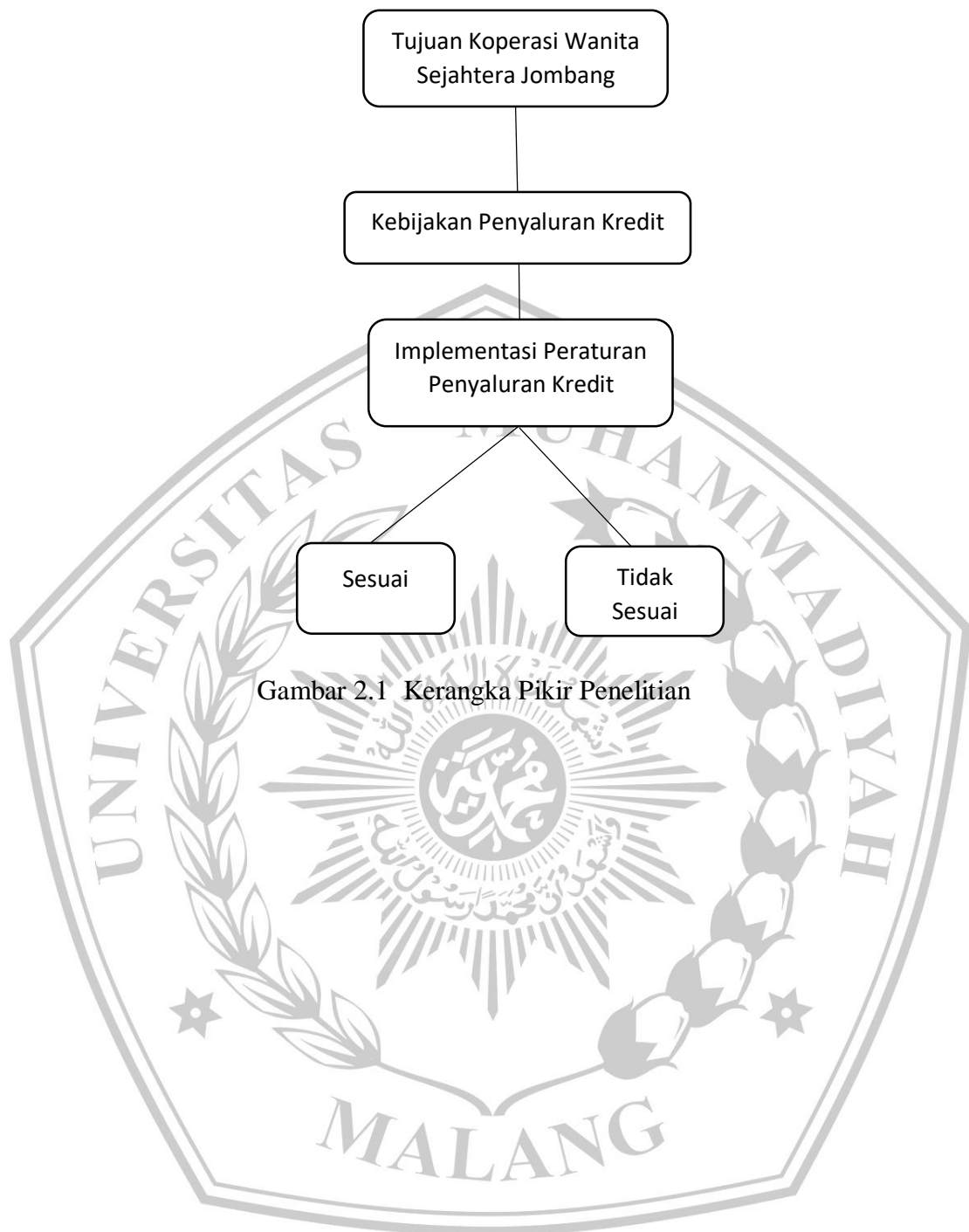
### 3. Evaluasi Kredit dan Tindak Lanjut

Koperasi dalam menjalankan kegiatan penyaluran kredit perlu melakukan pengawasan kreditnya agar terhindar dari adanya masalah-masalah kredit. Menurut Suhardjono (2003:100) pengawasan kredit yaitu melakukan pembinaan nasabah agar kredit dipergunakan sesuai dengan permohonan, bunga dibayarkan sesuai kesepakatan serta pengembalian kredit dilakukan tepat waktu. Fungsi pembinaan dan pengawasan dalam bidang pengkreditan menjadi sangat penting setelah kredit dicairkan, oleh karena itu fungsi pembinaan dan pengawasan harus berperan agar dapat mengantisipasi atas timbulnya resiko kerugian dalam pemberian kredit.

#### C. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan rumusan masalah yang telah diuraikan mengenai penyaluran kebijakan kredit maka dibuat kerangka dengan menjelaskan tujuan koperasi memiliki pengaruh terhadap penyaluran kebijakan kredit. Hubungan kebijakan penyaluran kredit pada koperasi dengan implementasi kebijakan penyaluran kredit apakah sudah sesuai atau tidak sesuai.

Penilaian implementasi dan kebijakan penyaluran kredit dapat menjadi alat untuk menilai kebijakan yang diterapkan pada koperasi sudah sesuai atau tidak dan prosedur penyaluran kredit. Penilaian yang dilakukan dapat membantu koperasi untuk pedoman pada saat penyaluran kredit. Keputusan kebijakan kredit sesuai atau tidak dapat dijelaskan pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian